

Penyusunan Kelengkapan Administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang Sore Guna Kelancaran Kegiatan Organisasi

Rita Mutiarni*, Langgeng P Utomo, Rachyu Purbowati
STIE PGRI Dewantara Jombang

Korespondensi*: lan99en9.pu36@gmail.com

Diserahkan: 5 Maret 2021, Direvisi: 15 Maret 2021, Tersedia daring: 4 April 2021

Abstrak

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diprakarsai oleh pemerintah pusat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Jombang, dengan pemberian dana stimulus sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk setiap desa, termasuk desa Dukuhklopo yang terletak di kecamatan Mojoagung, Jombang dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang Sore dengan jenis usaha simpan pinjam. Dalam perkembangannya, pengelolaan keuangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang Sore sudah cukup baik namun ada beberapa kelengkapan administratif yang kurang. Untuk itu, penulis bersama team mahasiswa yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Dukuhklopo melakukan kegiatan pembenahan kelengkapan administratif di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang Sore, antara lain: 1. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP), 2) Penyusunan AD/ART, 3) Penyusunan Tata tertib diagra alir kegiatan, 4) Pemenuhan kelengkapan surat-surat administrasi lainnya, 5) Pembuatan logo Bumdes. Kegiatan tersebut telah diselesaikan dengan baik oleh penulis bersama team mahasiswa KKN. Kegiatan ini akan dilanjutkan pada semester genap tahun akademik 2020/2021 dengan sasaran kegiatan adalah perbaikan pada system pencatatan keuangan unit simpan pinjam.

Kata kunci: BUMDes Dukuhklopo, Kembang Sore, Administratif.

Abstract

The establishment of Village Enterprises (BUMDes) initiated by the central government was immediately followed up by the Jombang regional government, by providing a stimulus fund of Rp. 100,000,000.00 for each village, including Dukuhklopo village which is located in Mojoagung sub-district, Jombang by forming a Village Enterprise (BUMDes) Kembang Sore with the type of business is a savings and loan business. During its development, the financial management at Village Enterprises (BUMDes) Kembang Sore is quite good, but there is some administrative completeness that is lacking. For this reason, the authors and a team of students who are carrying out a Real Work Lecture (KKN) in the village of Dukuhklopo carry out improvements in administrative completeness at Kembang Sore Village Enterprises (BUMDes), including 1. Preparation of Standard Operational Procedures (SOP), 2) Preparation of AD / ART, 3) Arrangement of rules and regulations in the flow of activities, 4) Fulfillment of other administrative documents, 5) Making the Bumdes logo. This activity has been completed properly by the author and the KKN student team. This activity will be continued in the even semester of the 2020/2021 academic year with the target of the activity is to improve the financial recording system of the savings and loan unit.

Keywords: BUMDes Dukuhklopo, Kembang sore, Administrative.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintahan presiden Joko Widodo terus berupaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai upaya terus dilaksanakan, mulai dari pelibatan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah. Semua dituntut untuk ikut menyukseskan program pemerintah.

Sebagai salah satu kewajiban yang termuat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, STIE PGRI Dewantara Jombang sebagai salah satu kampus terkemuka di Jombang

terpanggil untuk ikut menyukseskan program pemerintah tersebut. Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), tim penulis sebagai dosen di STIE PGRI Dewantara Jombang memberikan pelatihan dan pendampingan pada salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah pada tahun 2015, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang Sore yang ada di desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan – Jombang.

Kegiatan ini juga turut dibantu mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa tersebut. Sasaran kegiatan pada pelaksanaan KKM ini adalah pendampingan penyusunan kelengkapan administrasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kembang Sore Desa Dukuhklopo – Peterongan – Jombang. Tim penulis bersama mahasiswa mengangkat permasalahan tersebut sebagai tema utama kegiatan kkm karena mulai berdiri yaitu tahun 2015 hingga saat ini Bumdes Kembang Sore belum memiliki alat kelengkapan administrasi standar untuk beropreasinya suatu organisasi.

Kegiatan PKM ini dilakukan secara insentif selama kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu selama bulan Pebruari 2021. Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya alat kelengkapan administrasi standard seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan berbagai berkas kelengkapan kegiatan simpan pinjam.

2. Profil Mitra Binaan

BUMDes Kembang Sore merupakan sebuah Badan Usaha Milik Desa yang terletak di Desa Dukuh Klopo Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Tepatnya berada di Jalan Kenangan No.1 Desa Dukuh Klopo. BUMDes Kembang Sore berdiri sejak tahun 2010, kemudian pada tahun 2015 memberikan dana kepada BUMDes untuk kegiatan operasional, Dana operasional dari pemerintah yang mengawali BUMDes Kembang Sore untuk membuka unit usaha simpan pinjam. Sejauh ini BUMDes Kembang Sore hanya melakukan unit kegiatan usaha simpan pinjam, dimana ada 3 (tiga) unit yang tergabung dengan BUMDes Kembang Sore yakni:

1. Simpan pinjam milik BUMDes Kembang Sore;
2. Simpan pinjam milik Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKU); dan
3. Simpan pinjam milik Badan Kredit Desa (BKD)

Unit usaha BUMDes Kembang Sore memiliki usaha simpan pinjam. Karena itu, permasalahan yang selama ini dihadapi adalah terkait pada hal-hal yang melekat pada usaha tersebut. Secara umum, masalah yang dihadapi adalah terkait dengan:

1. Masalah kelengkapan Administrasi
2. Pencatatan dan pelaporan transaksi yang masih dilakukan secara manual.

Meskipun BUMDes Kembang Sore sendiri telah menjalankan sistem keuangan yang telah diberikan oleh DPMD Kabupaten Jombang namun hal tersebut masih belum dikuasai dan dianggap terlalu sulit bagi para pengurus bumdes. Melihat dari permasalahan terbut, maka penulis membagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi 2 (dua) bagian, yang akan diselesaikan pada semester genap 2020/2021 dan semester ganjil 2021/2022. Untuk pelaksanaan pada semester genap 2020/2021, penulis bersama tim enitikberatkan pelaksanaan kegiatan pada penyusunan Kelengkapan Administrasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kembang Sore, Desa Dukuhklopo – Peterongan – Jombang, yang meliputi: 1) Penyusunan Standart Operasional Prosedur, 2) Penyusunan AD/ART, 3) Penyusunan Tata tertib diagram alir kegiatan, 4) Pemenuhan kelengkapan surat-surat administrasi lainnya, 5) Pembuatan logo Bumdes.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 10 (sepuluh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil),
3. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (local wisdom),
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat,
5. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada didesa.
6. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal.
7. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa
8. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (village policy)
9. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
10. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Asset ekonomi yang ada didesa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Disebutkan pula bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Saragi (2004) dalam bukunya menyebutkan ada 5 tujuan pembentukan BUMDes yaitu: 1) Peningkatan kemampuan keuangan desa, 2) Pengembangan usaha masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, 3) Mendorong tumbuhnya usaha masyarakat, 4) Penyedia jaminan social, 5) Penyedia pelayanan bagi masyarakat desa.

C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Unit usaha BUMDes Kembang Sore memiliki usaha simpan pinjam. Karena itu, permasalahan yang selama ini dihadapi adalah terkait pada hal-hal yang melekat pada usaha tersebut. Secara umum, masalah yang dihadapi adalah terkait dengan:

3. Masalah kelengkapan Administrasi
4. Pencatatan dan pelaporan transaksi yang masih dilakukan secara manual.

Meskipun BUMDes Kembang Sore sendiri telah menjalankan sistem keuangan yang telah diberikan oleh DPMD Kabupaten Jombang namun hal tersebut masih belum dikuasai dan dianggap terlalu sulit bagi para pengurus bumdes.

Melihat dari permasalahan terbut, maka penulis membagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi 2 (dua) bagian, yang akan diselesaikan pada semester genap 2020/2021 dan semester ganjil 2021/2022.

Untuk pelaksanaan pada semester genap 2020/2021, penulis bersama tim etikberatkan pelaksanaan kegiatan pada penyusunan Kelengkapan Administrasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kembang Sore, Desa Dukuhklopo – Peterongan – Jombang, yang meliputi:

1. Penyusunan Standart Operasional Prosedur
2. Penyusunan AD/ART
3. Penyusunan Tata tertib diagra alir kegiatan
4. Pemenuhan kelengkapan surat-surat administrasi lainnya
5. Pembuatan logo Bumdes.

Kegiatan PKM yang dilakukan penulis melibatkan mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah kerja nyata (KKN) yang ada di Desa Dukuhklopo. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi mitra, maka kegitan PKM ini menitik beratkan pada kegiatan penyusunan Kelengkapan Administrasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kembang Sore yaitu mereview ulang SOP dan AD/ART, membantu membenahi pembukuan BUMDes agar sesuai dengan standar yang ada pada umumnya, serta mendampingi cara penggunaan aplikasi terbaru terkait pembukuan keuangan agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya program aplikasi yang telah diberikan oleh kampus, diharapkan kepada pengurus BUMDes mampu mengelola pencatatan keuangan BUMDes secara baik dan benar serta mampu menciptakan usaha-usaha lain yang kreatif dan inovatif.

Gambaran dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Review dan mengkaji ulang SOP berdasarkan AD/ART BUMDes Mereview dan mengkaji ulang SOP dan AD/ART dilakukan dengan mengumpulkan pengurus BUMDes di balai desa setempat. Mahasiswa membantu dengan mendampingi serta memberikan pemahaman kepada pengurus BUMDes mengenai maksud, pengertian dan tujuan adanya SOP serta AD/ART sebagai pedoman untuk memudahkan pelaksanaan kerja, karena SOP dan AD/ART sebagai landasan dasar kegiatan operasional BUMDes serta tahapan atau urutan pekerjaan yang akan menuntun para pengurus BUMDes dalam menyelesaikan tugasnya sehingga seluruh kegiatan operasional dapat lebih terarah dan sistematis.
2. Pembuatan logo BUMDes dan Stempel Logo BUMDes. Pembuatan logo adalah hal yang sudah lama dipikirkan oleh pengurus BUMDes Kembang Sore, tetapi belum

terlaksana sampai sekarang. Oleh karena itu penulis dan tim KKN dengan kreatifitas dan kemampuannya merancang dan membuat logo BUMDes Kembang Sore sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengurus BUMDes.

3. Pembuatan surat pernyataan pengembalian jaminan, klausul penyitaan jaminan, serta berita acara penyitaan jaminan. Seiring berjalannya kegiatan simpan pinjam di BUMDes Kembang Sore, direktur BUMDes memikirkan bagaimana caranya agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan apabila ada penunggakan pembayaran maupun kehilangan barang jaminan yang telah diserahkan kepada pemiliknya. Oleh karena itu pihak BUMDes mmeminta bantuan dari tim pelaksana untuk membuat sebuah surat pernyataan dan sebuah klausul yang menyatakan bahwa jaminan akan disita apabila tidak dapat melunasi pinjaman. Tetapi dalam penyusunan surat-surat tersebut tetap didiskusikan dengan pengurus BUMDes sampai terbentuknya berkas-berkas tersebut.

D. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM yang dilakukan oleh tim penulis dengan dibantu mahasiswa dilakukan secara intensif selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yaitu selama bulan Pebruari 2021. Pelaksanaan dilakukan secara langsung terjun ke lapangan yaitu pendampingan langsung ke BUMDes Kembang Sore Dukuhklopo serta pendampingan secara daring mengingat, saat pelaksanaan PKM masih dalam suasana pandemic Covid-19. Tim penulis bersama mahasiswa mendampingi penyusunan berbagai berkas kelengkapan administrative agar pelaksanaan kegiatan BUMDes lebih baik.

Tahapan dari kegiatan ini dimulai dengan koordinasi antara tim penulis dengan mahasiswa yang akan membantu di lapangan. Kegiatan ini diperlukan guna menyamakan visi dan langkah pada saat terjun di desa. Selanjutnya, dilanjutkan dengan kegiatan musyawarah dari para perangkat desa Dukuhklo, pengurus BUMDes Kembang Sore, Tim penulis hingga perwakilan mahasiswa.



Gambar 1: Rapat koordinasi awal dengan mahasiswa serta dengan perangkat desa Dukuhklopo

Dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan diperoleh hasil yang memuaskan. Tim penulis beserta mahasiswa mampu mendampingi para pengurus BUMDes Kembang Sore menyusun buku Pedoman SOP & AD/ART BUMDes Kembang Sore yang berisi tentang struktur organisasi, SOP, AD/ART, dan kelengkapan berkas administrasi BUMDes Kembang Sore dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam (surat perjanjian, surat pernyataan, kwitansi, berita acara, dan lain-lain). Selain itu, tim penulis dengan dibantu mahasiswa juga merumuskan logo BUMDes yang baru yang telah lama diharapkan oleh pengurus BUMDes sebagai salah satu identitas dari



Gambar 2: Koordinasi antara tim penulis, mahasiswa serta pengurus BUMDes untuk penyusunan SOP dan Logo

E. PENUTUP

Kegiatan PKM dengan melibatkan mahasiswa yang sedang KKN telah memberi banyak manfaat khususnya bagi BUMDes Kembang Sore. Beberapa hal yang telah dilakukan penulis bersama tim adalah: 1) Terciptanya buku Pedoman SOP & AD/ART BUMDes, 2) Terciptanya kelengkapan berkas administrasi BUMDes Kembang Sore dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam (surat perjanjian, surat pernyataan, kwitansi, berita acara, dan lain-lain).

Namun demikian, kegiatan PKM ini hanyalah awal. Masih ada kegiatan lanjutan yang telah disepakati antara penulis dengan pihak Bumdes Kembang Sore yaitu pelatihan dan pendampingan pemanfaatan aplikasi keuangan khusus bumdes yang disebut SIMASBUJANG (Sistem Informasi Simpan Pinjam Bumdes Jombang). Kegiatan ini rencananya akan dilakukan pada semester gasal tahun akademik 2021/2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Herawati, E. (2016, Oktober). Binus business-law. Retrieved April 2018, from Binus Business Law Web site: <http://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/badan-usaha-milik-desa-status-dan-pembentukannya/>
- Mutiarni, R. (2017). Implementasi Electronic Data Processing Pada Koperasi Wanita. Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 12(2 Okt), 135-148.
- Mutiarni, R., Zuhroh, S., & Utomo, L. P. (2018). Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan-Jombang. *Comvice: Journal of community service*, 2(1), 21-28.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun, (8)
- Undang-Undang, R. I. No. 32 tahun 2004 tentang. Pemerintahan Daerah. Indonesia, R. (1999).